

# EFEKTIFITAS PENCAPAIAN RASIO POLISI DAN MASYARAKAT TERHADAP KEBERADAAN ANGGOTA POLRI DI LAPANGAN

(Hasil penelitian tahun 2008)

*Jumlah keseluruhan anggota Polri pada tahun 2006 telah mencapai 368.917 orang. Pada tahun 2007, jumlah personel bertambah 13.330 orang menjadi 382.243 personel dan pada tahun 2008 jumlah personel Polri sudah mencapai 391.124 orang (bertambah 22.207). Dengan meningkatnya jumlah anggota Polri berarti meningkat pula ratio/perbandingan antara anggota Polri dengan masyarakat. Dengan jumlah penduduk Indonesia yang pada tahun 2008 diperkirakan sebesar 228.000.000 jiwa, ratio polisi dengan masyarakat telah mencapai 1:583. Sedangkan pada tahun 2009 ratio polisi dengan masyarakat diperkirakan bisa mencapai 1 : 580, dengan asumsi jumlah penduduk Indonesia pada saat itu sebanyak 232.000.000 jiwa.*

## I. LATAR BELAKANG

Salah satu sasaran strategis dalam kebijakan dan strategi Polri berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/20/IX/2005, tanggal 7 September 2005 tentang Rencana Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia 2005 - 2009 adalah terwujudnya keinginan masyarakat untuk memperoleh pelayanan keamanan. Dengan kurangnya keberadaan anggota Polri di lapangan, dikhawatirkan sasaran strategis tersebut akan sulit dicapai.

Kurangnya keberadaan anggota Polri di lapangan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor dan kendala, sehingga perlu dicarikan solusinya dengan menganalisa kenyataan yang ada melalui penyelenggaraan penelitian dan pengembangan terhadap efektifitas pencapaian ratio polisi dengan masyarakat terhadap keberadaan anggota Polri di lapangan.

Perkembangan Kepolisian yang profesional dan modern tidak luput dari perkembangan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa perkembangan dan perubahan masyarakat, serta modernisasi kepolisian dapat dipacu oleh perubahan dalam kualitas tertib sosial. Indikator keseriusan pihak Polri dalam merespon tuntutan masyarakat tersebut dapat terlihat dari adanya para pemerhati polisi dan praktisi yang menyadari arti pentingnya "Pelayanan" kepada masyarakat sebagai salah satu core bussines yang harus ditingkatkan kualitasnya dari waktu ke waktu.

Peningkatan kuantitas dan kualitas personel

dalam rangka pelayanan kepada masyarakat perlu dianalogikan dengan peningkatan pelayanan di lembaga-lembaga bisnis, karena hakekat tugas Polri adalah memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Oleh karenanya kualitas pelayanan tersebut perlu dipandang sebagai suatu manajemen tentang bagaimana bagian pemasaran dan operasional secara bersama-sama (melalui teknologi dan manusia) mampu merencanakan, menciptakan dan menyerahkan suatu paket yang dapat bermanfaat bagi pelanggan dalam kaitannya dengan pelayanan kepada mereka.

Besarnya jumlah anggota Polri dan tingginya ratio polisi dengan masyarakat belum memperlihatkan peningkatan jumlah anggota Polri di lapangan untuk melaksanakan tugas operasional kepolisian, sehingga dirasakan kurang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jumlah keseluruhan anggota Polri pada tahun 2006 telah mencapai 368.917 orang. Pada tahun 2007, jumlah personel bertambah 13.330 orang menjadi 382.243 personel dan pada tahun 2008 jumlah personel Polri sudah mencapai 391.124 orang (bertambah 22.207).

Dengan meningkatnya jumlah anggota Polri berarti meningkat pula ratio/perbandingan antara anggota Polri dengan masyarakat. Dengan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2008, yang diperkirakan sebesar 228.000.000 jiwa, telah mencapai ratio polisi dengan masyarakat 1:583. Sedangkan pada tahun 2009 ratio polisi dengan masyarakat diperkirakan dapat mencapai 1 : 580,

dengan asumsi jumlah penduduk Indonesia pada saat itu sebanyak 232.000.000.

## II. Permasalahan

Dari uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan pokoknya adalah : "Bagaimana efektifitas pencapaian ratio polisi dengan masyarakat terhadap keberadaan anggota Polri di lapangan".

Dari permasalahan tersebut, secara rinci persoalan-persoalan penelitian dapat diidentifikasi, sebagai berikut :

- a. Bagaimana pencapaian ratio polisi dengan masyarakat di satuan kewitayahan Polri (Polda, Poltabes, Polres/Ta, serta Polsek )?
- b. Bagaimana pengalokasian personel Polri yang ada di Satwil untuk pelaksanaan tugas Opsnal dan non Opsnal ?
- c. Bagaimana penggelaran keberadaan anggota Polri dilapangan untuk melaksanakan tugas Opsnal ?
- d. Bagaimana dampak penggelaran anggota Polri di lapangan untuk melaksanakan tugas Opsnal tersebut ?
- e. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan penggelaran keberadaan anggota Polri di lapangan untuk pelaksanaan tugas Opsnal ?
- f. Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan penggelaran keberadaan anggota Polri di lapangan agar terwujud keinginan masyarakat untuk memperoleh pelayanan keamanan ?

## III. Landasan Teori

### A. Visi Misi

Sebagai ujung tombak dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri harus mampu beradaptasi dengan segala perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Di tengah dinamika yang begitu pesat Polri menghadapi tantangan yang semakin berat dan kompleks yang pada akhirnya memperluas bentang dan tantangan tugas Polri.

Dalam menghadapi perubahan yang cepat, Polri harus memiliki pandangan kedepan yang mampu membimbing dan memberikan arah pengembangan dan kemajuan yang lebih tinggi dibanding dengan intensitas permasalahan yang dihadapi.

Sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas kedepan telah dirumuskan Visi dan Misi Polri, sebagai berikut :

- a. Visi yaitu terwujudnya Postur Polri yang pro-

fessional, bermoral dan modern sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang terpercaya dalam memelihara Kamtibmas dan menegakkan hukum.

### b. Misi :

- 1) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, tanggap / responsive dan tidak diskriminatif agar masyarakat bebas dari segala bentuk gangguan fisik dan psikis.
- 2) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat sepanjang waktu di seluruh wilayah, serta memfasilitasi keikutsertaan masyarakat dalam memelihara Kamtibmas di lingkungan masing-masing.
- 3) Memelihara Kamtibcar Lantas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang.
- 4) Mengembangkan perpolisian masyarakat ( Community Policing ) yang berbasis pada masyarakat patuh hukum ( Law Abiding Citizen ).
- 5) Menegakkan hukum secara profesional, obyektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.
- 6) Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya Polri guna mendukung operasional tugas Polri.

### B. Analisa Perkembangan Kekuatan Polri

Polri telah mengambil langkah reformasi menuju lembaga kepolisian sipil, profesional dan mandiri, dengan pembenahan berkelanjutan dengan menentukan pada reformasi struktural, reformasi instrumental dan reformasi kultural. Dalam pelaksanaan reformasi struktural, paradigma baru pada pola organisasi Polri sebagai postur kekuatan Polri, dengan mengandalkan Polsek dan Polres sebagai ujung tombak bagi pelayanan kepada masyarakat, yang didukung dengan peran strategis pelaksana pusat pembinaan dan pelaksana pusat operasional serta satuan induk berseragam dari Mabes Polri, bagi Polda sebagai satuan induk penuh.

Reformasi instrumental, berupa perubahan sistem piranti lunak, fungsional dalam organisasi Polri sebagai pedoman operasional fungsi, antara lain, pada pembenahan manajemen keuangan dan budget dengan sistem penganggaran berbasis kinerja, sehingga pelayanan polisi pada masyarakat diharapkan makin efektif. Reformasi kultural yaitu dengan meletakkan landasan dalam bentuk pembenahan manajemen sumber daya manusia dengan berorientasi strategi untuk mewujudkan polisi berwibawa dan berkinerja yang profesional,

memperjelas manajemen sumber daya manusia yang sehat, mulai dari sistem rekrutmen, sistem pendidikan dan seleksi, sistem penilaian kinerja, sistem jalur karier, sampai pada sistem remunerasi.

Adanya komitmen dari pimpinan Polri untuk meningkatkan kuantitas/jumlah personel Polri, dengan perbandingan awal rasio jumlah polisi terhadap pertumbuhan penduduk, dari rasio 1 : 750 pada tahun 2004, hingga mencapai rasio yang mendekati ideal 1 : 500, serta diikuti dengan peningkatan kualitas anggota Polri dengan mengedepankan prinsip mahir, terpuji dan patuh hukum.

Jumlah peralatan yang dimiliki Polri telah mencapai jumlah 49.280.864, yang terdiri dari berbagai jenis. Pada intinya peralatan standar untuk melaksanakan tugas pokok telah mulai dicukupi sejak tingkat Polsek. Kemudian secara berjenjang ke atas sampai dengan Direktorat Operasional dan Biro Pembinaan di tingkat Mabes Polri. Secara umum rata-rata pada seluruh Polsek di pedalaman dan pantai telah dilengkapi dengan sepeda motor minimal 2 (dua) unit, Polsek di kota besar minimal 2 (dua) unit roda empat (R-4) dan di Metropolitan setidaknya 5 (lima) unit R-4. Untuk tiap Kapolres dilengkapi dengan mobil jabatan dengan kondisi baik dan minimal 1 (satu) unit truk pengendali massa (Dalmas) bahkan lebih dan beberapa unit mobil jabatan staf serta operasional lainnya.

Di tingkat Polwil terdapat setidaknya 1 (satu) Kompi Brimob lengkap dengan peralatan standar tugasnya, dan di tiap Polda berkedudukan satuan Brimobda yang juga relatif cukup peralatannya. Di tiap Polda juga dapat di BKO kan setidaknya 1 (satu) unit heli atau fixed wing sesuai keperluannya, disamping minimal 2 (dua) unit kapal type C di Polda perairan. Dalam rangka memperhatikan kesejahteraan personel, setidaknya dicukupi kelengkapan tugas perorangan dan pemenuhan kebutuhan BBM dalam bertugas, agar tidak menggerogoti gaji dan tunjangan. Semua kebutuhan tersebut dipenuhi guna lebih meningkatkan keamanan dan ketertiban umum, agar memungkinkan masyarakat mempunyai kepercayaan dan kemampuan turut mengambil bagian dalam mendukung operasi kepolisian.

Menurut Anton Tabah dalam bukunya yang berjudul "*Membangun Polri yang Kuat*", bahwa untuk membangun mutu Kepolisian yang ideal ada 5 (lima) syarat yang telah disepakati dunia, meliputi SDM, sistem maupun peralatannya. Kelima syarat tersebut adalah :

- a. *Well Motivated*, untuk mendapatkan mutu polisi yang baik seorang calon kader polisi harus memiliki motivasi yang baik, ketika seorang calon polisi menjatuhkan pilihannya untuk menjadi polisi. Motivasi inilah yang akan ikut memberi warna pemolisian seorang polisi dalam mengembangkan karier kepolisiannya. Well motivated dapat dipantau sejak awal rekrutmennya.
- b. *Well Educated*, untuk mendapatkan calon polisi yang baik setelah persyaratan memiliki motivasi yang baik, juga harus dididik untuk menjadi polisi yang baik. Ini menyangkut sistem pendidikan, doktrin kurikulum dan proses belajar mengajar yang cukup rumit dan kompleks. Semua merupakan sistem karena satu sama lain saling terkait.
- c. *Well Trained*, betapapun baiknya mutu pendidikan di kepolisian, tanpa diikuti manajemen pelatihan yang baik juga akan sia-sia, itulah pentingnya "Well Trained". Pelatihan yang baik tentunya melakukan proses managerial yang ketat agar pendidikan dan pelatihan yang sinkron, mampu menjawab berbagai tantangan kepolisian aktual maupun tantangan masa depan.
- d. *Well Equipment*, adalah masalah peralatan kepolisian. Ini menyangkut sarana dan prasarana serta teknologi kepolisian. Well Equiped didalam Polri telah menjadi kendala serius selama ini. Karena itu tepat untuk dijelaskan secara lebih detail seperti halnya masalah tingkatan kesejahteraan (welfare). Masalah peralatan Polri jangankan yang canggih seperti DNA, yang sederhana tetapi vital sehari-hari (HT) saja Polri masih belum terpenuhi. Peralatan HT idealnya setiap polisi ber-HT, baik itu polisi operasional maupun polisi pembinaan (staf).
- e. *Welfare*, kesejahteraan anggota Polri sampai saat ini memang masih tergolong terendah di dunia. Bahkan kalau dibandingkan dengan sesama Negara Asean saja. Untuk mengukur kesejahteraan polisi, PBB telah membuat standart, gaji polisi dibanding dengan gaji pegawai keuangan Negara atau perbankan disetiap negara. Lebih tinggi atau lebih rendah, PBB tidak menentukan angka, tetapi gaji pegawai keuangan dan bank dijadikan ukuran di mana tingkat kesejahteraan polisi. Gaji karyawan keuangan Negara dan bank disetiap Negara relatif diatas rata-rata. Gaji seorang polisi harus diatas dari pegawai keuangan Negara dan bank agar polisi bekerja maksimal, tak

mudah disogok dan tak mudah kolusi.

C. Membangun Polisi yang dipercaya masyarakat.

Membangun polisi yang dipercaya masyarakat sejalan dengan rencana strategi dan operasionalisasi membangun kepercayaan terpadu mencakup : menanamkan kepercayaan (trust building) dengan khalayak publik, memperluas kemitraan (partnership dan networking) secara bertahap dengan masyarakat, meningkatkan kesempurnaan (strive for excellence) dalam setiap kegiatan polisi, dan menghindarkan kompromi atau sub-optimalisasi kinerja, dengan sasaran :

- a. Penanggulangan berbagai kejahatan dengan strategi terpadu berbasis sistem intelijen terkini.
- b. Mempersempit ruang gerak kejahatan transnasional dan kejahatan terorganisir.
- c. Memfokuskan efektivitas penanggulangan kejahatan berat yang paling menyentuh kepentingan masyarakat, antara lain perampokan di tempat umum/pemukiman, pencurian kendaraan dan NAPZA.
- d. Mendekatkan pelayanan Polri kepada warga masyarakat sebagai nilai utama.
- e. Memberikan respon cepat berstandar (10 menit sampai di TKP) terhadap setiap panggilan bantuan dari masyarakat.
- f. Meningkatkan profesional Polri dengan didukung teknologi informasi yang terpadu, untuk sinergi operasi serta memudahkan akses publik atas transparansi manajemen penegakkan hukum, pengawasan dan pengembangan sarana prasarana (e-government).
- g. Pengembangan sarana dan prasarana yang memadai rata-rata per tahun 20% secara akumulatif dari jumlah Polres dan Polsek termasuk biaya pemeliharaannya pada tiap Polda.

Mengetengahkan Polri sebagai institusi sipil, yang memiliki jajaran polisi yang memperlihatkan keteladanan warga Negara, berintegritas, profesional, akrab, dan tegas namun patuh hukum dalam menegakkan hukum.

Mengembangkan sistem komunikasi semua jajaran kerja Polri, dengan didukung teknologi komunikasi, mulai dari kecepatan respon, komunikasi persuasif, sampai pada pengendalian peristiwa kejahatan, diimbangi dengan pelayanan perlindungan dan pengayoman.

D. Membangun sinergi penyelenggaraan keamanan, melalui cara :

a. Membangun kemitraan.

- 1) Kemitraan dalam meningkatkan peran pengamanan Polsus (Polisi Khusus), Polisi

internal, Polisi masyarakat, dan kelompok masyarakat yang patuh hukum.

- 2) Kemitraan dengan kelompok keamanan komunitas untuk keamanan insan setiap individu, keamanan internal, keamanan umum masyarakat dan institusi keamanan Negara lainnya.

b. Membangun kapasitas (capacity building) Polri sebagai daya dukung yang handal pada setiap pelayanan para anggota Polisi, mulai dari nilai-nilai, budaya, pengetahuan, ketrampilan, kesejahteraan SDM, teknologi kepolisian, dengan prioritas penyempurnaan efektivitas postur Polri.

1) Tingkat Mabes Polri

Mabes Polri berkedudukan sebagai perumus kebijakan politik strategi keamanan mengikat seluruh jajaran Polri termasuk kehandalan kesatuan pelaksana utama.

2) Tingkat Polda

Polda berkedudukan sebagai Kesatuan Induk Penuh (KIP) di wilayah hukumnya bertanggung jawab atas :

- a) Merumuskan kebijakan yang bersifat strategis di wilayahnya.
- b) Penyelenggaraan keamanan dan tindakan polisional di wilayah hukumnya, dengan memperhatikan sistem otonomi daerah yang berlaku.
- c) Pembinaan kelembagaan Kepolisian sebagai jabaran dari politik strategi keamanan yang telah ditetapkan.

3) Tingkat Polres

a) Polres berkedudukan sebagai Kesatuan Operasional Dasar (KOD) sebagai pelaksana utama Polda mengemban dan melaksanakan semua fungsi manajemen Kepolisian bagi terselenggaranya keamanan di wilayah hukumnya.

b) Memperluas gelar Lapis Kemampuan dan Kekuatan pada tingkat Polres sebagai lanjutan langkah-langkah reformasi Polri yang sudah dicapai, penguatan Postur Polri, perubahan pola kejahatan, serta perubahan tuntutan masyarakat demokrasi.

4) Tingkat Polsek

a) Polsek adalah ujung tombak operasional Kepolisian merupakan kesatuan Kepolisian terdepan yang melaksanakan dan memberikan pelayanan Kepolisian kepada masyarakat, secara terus menerus

- sepanjang waktu.
- b) Memperluas Gelar Lapis Kemampuan dan kekuatan pada tingkat Polsek sebagai lanjutan langkah-langkah reformasi Polri yang sudah dicapai, penguatan Postur Polri, perubahan pola kejahatan, serta perubahan tuntutan masyarakat demokrasi.
  - c) Terciptanya lingkungan kerja dengan adanya bantuan fungsional Kepolisian masyarakat dan lingkungan kerja, yang pada akhirnya terbentuk lingkungan makro dengan luas wilayah dan jumlah penduduk serta terbangunnya pranata hukum dan pranata sosial.
  - d) Terbangunnya sinergi dengan potensi masyarakat bersamaan dengan terbentuknya lingkungan makro law abiding citizen di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat.
  - e) Terbentuknya jaringan intelijen keamanan nasional dari adanya akar gangguan, pengendapan masalah keamanan, ambang gangguan sehingga dapat mengatasi setiap gangguan nyata.

#### E. Membangun Masyarakat Patuh Hukum

- a. Kerjasama dengan institusi penegakan hukum dan Kementrian yang membawahi PPNS, Pemda serta kelompok masyarakat peduli hukum dan keadilan :
  - 1) Merumuskan pedoman pemahaman

keteladanan.

- b. Terwujudnya penegakkan keadilan terhadap masyarakat, terutama memiliki strategi pencegahan tindak kriminal, penerapan yang konsisten pada prosedur penanganan pelaku tindak kriminal sesuai hukum dan hak asasi manusia, serta memberdayakan pranata sosial masyarakat.
- c. Terwujudnya 7 (tujuh) dimensi pelayanan masyarakat yang mencakup :
  - 1) Berkomunikasi berbasis kepedulian.
  - 2) Cepat tanggap.
  - 3) Kemudahan pemberian informasi.
  - 4) Prosedur yang efisien dan efektif.
  - 5) Biaya yang formal dan wajar.
  - 6) Kemudahan penyelesaian urusan.
  - 7) Lingkungan fisik tempat kerja yang kondusif.

#### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### 1. Pencapaian ratio Polri dengan Masyarakat

Berdasarkan Daftar susunan personel dan perlengkapan Polri, sesuai Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/07/II/ 2005 tanggal 31 Januari 2005 tentang Perubahan Kep/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan tata kerja satuan-satuan organisasi Polri pada tingkat kewilayahan dan perubahannya. Bahwa daftar susunan personel di kewilayahan terdiri dari Polda tipe A1, A2, B1 dan B2. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pencapaian ratio Polri dengan masyarakat sesuai dengan sampel Polda penelitian adalah sebagai berikut :

Tabel 1

Ratio Polri dan masyarakat dan luas wilayah

No	Polda	Personel		Masyarakat	Luas Wil	Perbandingan			
		Polri	PNS			Polri dgn masy	Polri+ PNS dgn masy	Polri dgn luas wil	Polri+ PNS dgn luas wil
1.	Metrojaya	29.555	1.367	9.060.449	664 km <sup>2</sup>	307	293	0,02 km <sup>2</sup>	0,02 km <sup>2</sup>
2.	Jabar	28.938	1.508	39.993.911	34.817 km <sup>2</sup>	1.380	1.312	1,2 km <sup>2</sup>	1,14 km <sup>2</sup>
3.	Bali	11.839	631	3.527.994	5.636 km <sup>2</sup>	298	283	0,48 km <sup>2</sup>	0,45 km <sup>2</sup>
4.	Babel	2.809	81	1.036.079	81.725 km <sup>2</sup>	369	358	29,09 km <sup>2</sup>	28,28 km <sup>2</sup>
5.	Sultra	5.744	135	1.978.827	38.140 km <sup>2</sup>	344	337	6,64 km <sup>2</sup>	6,49 km <sup>2</sup>
6.	Maluku	6.396	202	1.350.156	712.479 km <sup>2</sup>	211	204	111 km <sup>2</sup>	107 km <sup>2</sup>

masyarakat patuh atau tertib hukum, hak dan kewajiban dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.

- 2) Mensosialisasikan semangat patuh hukum pada masyarakat, melalui

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar Polda, ratio polisi dengan masyarakat sudah memadai kecuali Polda Jabar dimana ratio polisi dengan masyarakat 1 : 1.380, sedangkan untuk perbandingan polisi dengan luas

wilayah yang sudah memadai adalah Metrojaya (1 : 0,02 km<sup>2</sup>), Jabar (1 : 1,14 km<sup>2</sup>) dan Bali (1 : 0,45 km<sup>2</sup>) sedangkan Polda Maluku, Babel dan Sultra perbandingan antara polisi dengan luas wilayah belum memadai. Dari beberapa Polda yang belum memadai perbandingan antara polisi dengan luas wilayah disebabkan karena beberapa hal yaitu sebagian besar wilayahnya merupakan kepulauan, penduduknya jarang, jarak antara koloni penduduk cukup jauh dengan jumlah penduduk dalam koloni sedikit. Akibatnya banyak kasus yang ada di pulau-pulau yang jauh yang tidak bisa terdeteksi.

## 2. Pengalokasian personel Polri yang ada di Satwil untuk pelaksanaan tugas Opsnal dan Non Opsnal

Walaupun secara umum ratio Polri dan masyarakat di Polda-polda yang menjadi sampel penelitian sudah tercukupi, namun jumlah tersebut masih sifatnya global belum secara jelas terinci untuk tiap-tiap fungsi operasional yang melayani masyarakat. Mengingat fungsi opsnal yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, perbandingan jumlah polisi dan masyarakat masih dirasakan kurang mencukupi. Apa lagi jumlah tersebut masih harus dikurangi lagi dengan jumlah anggota yang menduduki fungsi pembinaan. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pengalokasian personel Polri yang ada di Satwil untuk pelaksanaan tugas opsnal dan non opsnal adalah sebagai berikut :

Alokasi Personel Polri  
dalam tugas Opsnal dan Non Opsnal

Tabel 2

No	Fungsi	Polda Penelitian					
		MTJ	Jabar	Bali	Babel	Sultra	Maluku
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<u>Operasional Intelkam</u>	480	1.833	540	170	246	78
2.	Reskrim	1.604	2.591	1.409	182	226	89
3.	Samapta	3.348	5.671	969	543	3.183	415
4.	Lantas	4.834	2.872	1.617	260	341	108
5.	Polair	225	156	277	125	141	200
6.	Brimob	2.154	1.411	756	228	343	755
7.	Binamitra	264	701	120	47	81	34
8.	Narkoba	512	7553	218	17	30	30
9.	Lain-lain	6.983	7.698	4.403	592	666	-
<b>Jumlah</b>		<b>20.404</b>	<b>24.486</b>	<b>10.309</b>	<b>2.164</b>	<b>5.257</b>	<b>1.709</b>

Sumber : Bag Infopers SdeSDM Polri

Keterangan : \* = Itwasda, Rorenbang, Roops dan Spripim

\*\* = Data yang diperoleh tidak terinci hanya total saja.

## 3. Penggelaran keberadaan anggota Polri di Lapangan untuk pelaksanaan tugas Opsnal.

### a. Fungsi Intelkam

1) Kualitas dan kuantitas personel dalam tugas deteksi dini.

Tabel 3

Polda Penelitian		Kualitas dan kuantitas personel dalam tugas deteksi dini			Total
		Sudah terdukung	Sebagian terdukung	Belum terdukung	
Polda Sultra	Count	0	21	7	28
	% within Polda Penelitian	.0%	75.0%	25.0%	100.0%
Polda Bangka Belitung	Count	5	15	3	23
	% within Polda Penelitian	21.7%	65.2%	13.0%	100.0%
Polda Maluku	Count	3	17	10	30
	% within Polda Penelitian	10.0%	56.7%	33.3%	100.0%
Polda Jabar	Count	12	42	20	74
	% within Polda Penelitian	16.2%	56.8%	27.0%	100.0%
Polda Bali	Count	7	22	5	34
	% within Polda Penelitian	20.6%	64.7%	14.7%	100.0%
Polda Metrojaya	Count	4	4	3	11
	% within Polda Penelitian	36.4%	36.4%	27.3%	100.0%
Total	Count	31	121	48	200
	% within Polda Penelitian	15.5%	60.5%	24.0%	100.0%

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa pelaksanaan tugas pokok fungsi Intelkam khususnya dalam rangka deteksi dini, hanya sebagian yang sudah didukung dengan kuantitas dan kualitas yang memadai, hal ini disampaikan oleh 60,5% responden. Kondisi ini juga terjadi disemua Polda

1	2	3	4	5	6	7	8
II.	<b><u>Pembinaan</u></b>						
1.	Manajemen*	182	563	714	-	42	-
2.	Personel (SDM)	410	1.054	73	-	67	-
3.	Logistik	91	-	46	-	26	-
4.	Humas	-	-	12	-	12	-
5.	Hukum	-	-	14	-	9	-
6.	Propam	208	520	89	-	75	-
7.	Dokkes	28	130	25	-	29	-
8.	Telematika	-	143	31	-	14	-
9.	Keuangan	52	95	16	-	11	-
10.	Setum	-	-	12	-	6	-
11.	Demna	-	-	133	-	51	-
12.	Koperasi	-	230	-	-	-	-
13.	SPN	257	-	220	-	53	-
14.	Labfor	-	-	-	-	-	-
15.	Lain-lain	121	1.035	59	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>1.440</b>	<b>3.770</b>	<b>1.444</b>	<b>541**</b>	<b>395</b>	<b>499**</b>

kecuali di Polda Metrojaya dimana yang mengatakan sudah terdukung dan sebagian terdukung seimbang.

- 2) Kualitas dan kuantitas personel dalam tugas persandian

Kualitas dan kuantitas personel fungsi Intelkam dalam pelaksanaan tugas pengumpulan, penyimpanan dan pemutakhiran biodata tokoh formal/ organisasi sosial/ masyarakat/ politik/ pemerintah, seimbang antara belum terdukung (36%) dan sebagian terdukung (35%). Namun demikian untuk kondisi di tiap Polda bervariasi, untuk Polda Metrojaya seimbang antara belum terdukung dengan sebagian terdukung, Polda Bali sebagian besar terdukung, untuk Polda Jabar, Bangka Belitung Sebagian besar terdukung sedangkan Polda Sulawesi Tenggara dan Maluku sebagian besar belum terdukung.

- 3) Kualitas dan kuantitas personel dalam tugas pengumpulan, penyimpanan dan pemutakhiran biodata tokoh formal/ organisasi sosial/ masyarakat/ politik/ pemerintah.

Kualitas dan kuantitas personel fungsi Intelkam dalam pelaksanaan tugas pengumpulan, penyimpanan dan pemutakhiran biodata tokoh formal/ organisasi sosial/ masyarakat/ politik/ pemerintah, sebagian besar responden (54,0%) menyatakan sebagian terdukung. Kondisi ini juga terjadi

disemua Polda kecuali di Polda Bali sebagian besar menyatakan sudah terdukung dan Polda Maluku sebagian besar belum terdukung.

- 4) Kualitas dan kuantitas personil fungsi Intelkam dalam pelaksanaan tugas dokumentasi dan penganalisaan terhadap lingkungan strategik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya sebagian besar responden (58,5%) menyatakan bahwa pelaksanaan tugas dokumentasi dan penganalisaan terhadap lingkungan strategik tersebut sebagian besar terdukung dengan kualitas dan kuantitas. Kondisi ini juga terjadi di semua Polda kecuali Polda Maluku yang sebagian besar responden menyatakan belum terdukung.

- 5) Kualitas dan kuantitas personil fungsi Intelkam dalam pelaksanaan tugas penyusunan produk Intelejen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar fungsi Intelkam dalam pelaksanaan tugas penyusunan produk Intelejen sebagian telah terdukung dengan kualitas dan kuantitas yang memadai (52,0%). Kondisi ini jugaterjadi disemua Polda kecuali Polda Metrojaya yang mengatakan sebagian besar sudah terdukung dan Polda Maluku sebagian besar belum terdukung.

- 6) Kualitas dan kuantitas personil fungsi Intelkam dalam pelaksanaan tugas pembuatan perkiraan Intelijen

keamanan dan penyajian hasil analisa.

Dari Hasil penelitian menunjukkan bahwa 55,0% responden menyatakan pelaksanaan tugas pembuatan perkiraan Intelijen keamanan dan penyajian hasil analisa sebagian terdukung. Kondisi ini juga terjadi disemua Polda kecuali Polda Metrojaya yang menyatakan sebagian besar sudah terdukung dan Polda Bangka Belitung seimbang antara sudah terdukung dan sebagian terdukung.

- 7) Kualitas dan kuantitas personil Intelkam dalam pelaksanaan tugas pemberian pelayanan surat izin/ keterangan dan pengawasan yang menyangkut orang asing, senjata api dan bahan peledak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 50% responden menyatakan bahwa sebagian tugas pemberian pelayanan surat izin/ keterangan dan pengawasan yang menyangkut orang asing, senjata api dan bahan peledak. sebagian terdukung dengan kualitas dan kuantitas personel. Kondisi ini juga terjadi disemua Polda kecuali Polda Metrojaya yang menyatakan sebagian besar sudah terdukung.

- 8) Kualitas dan kuantitas personel fungsi Intelkam dalam pelaksanaan tugas pemberian pelayanan surat keterangan rekaman kejahatan (SKRK/ Criminal Record)

Hasil penelitian menunjukkan dapat diketahui ternyata sebagian besar responden (48,0%) menyatakan bahwa pelaksanaan tugas pemberian pelayanan surat keterangan rekaman kejahatan (SKRK/ Criminal Record) belum didukung dengan kuantitas dan kualitas personel yang memadai, kondisi ini juga terjadi disemua Polda.

Dengan kondisi tersebut, secara umum pelaksanaan tugas-tugas yang dilakukan oleh fungsi intelkam masih belum dapat dilakukan secara efektif.

#### b. Fungsi Binamitra

- 1) Kualitas dan kuantitas personel fungsi Binamitra dalam pelaksanaan penyuluhan dan penerangan dalam rangka ketertiban masyarakat

Tabel 4

Polda Penelitian		Kualitas dan kuantitas personil dalam penyuluhan dan penerangan			Total
		Sudah terdukung	Sebagian terdukung	Belum terdukung	
Polda Sultra	Count	2	9	16	27
	% within Polda Penelitian	7.4%	33.3%	59.3%	100.0%
Polda Bangka Belitung	Count	5	16	6	27
	% within Polda Penelitian	18.5%	59.3%	22.2%	100.0%
Polda Maluku	Count	2	13	8	23
	% within Polda Penelitian	8.7%	56.5%	34.8%	100.0%
Polda Jabar	Count	7	33	10	50
	% within Polda Penelitian	14.0%	66.0%	20.0%	100.0%
Polda Bali	Count	10	17	6	33
	% within Polda Penelitian	30.3%	51.5%	18.2%	100.0%
Total	Count	26	88	46	160
	% within Polda Penelitian	16.3%	55.0%	28.8%	100.0%



Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 55% responden menyatakan pelaksanaan penyuluhan dan penerangan dalam rangka ketertiban masyarakat yang dilaksanakan oleh fungsi Binamitra sebagian didukung dengan kualitas dan kuantitas personil. Kondisi ini juga terjadi disemua Polda kecuali Polda Sultra yang menyatakan sebagian besar belum didukung.

- 2) Kualitas dan kuantitas personel fungsi Binamitra dalam pelaksanaan pembinaan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pembinaan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa oleh personel Binamitra hanya sebagian besar (50,6%) yang menyatakan sebagian didukung dengan kuantitas dan kualitas personel yang ada. Kondisi ini juga terjadi disemua Polda kecuali Polda Bali yang menyatakan sudah didukung dan sebagian didukung seimbang yaitu 39,4%.

- 3) Kualitas dan kuantitas personel fungsi Binamitra dalam penyelenggaraan tugas Babinkamtibmas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk penyelenggaraan tugas pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat oleh fungsi Binamitra, hanya sebagian besar didukung didukung oleh kualitas dan kuantitas personel yang memadai (53,1%). Kondisi ini juga terjadi disemua Polda kecuali Polda Bali yang menyatakan sebagian besar sudah didukung (54,5%).

- 4) Kualitas dan kuantitas personel fungsi Binamitra dalam penyelenggaraan pembinaan hubungan kerja sama dengan organisasi/ lembaga/ tokoh kemasyarakatan dan Instansi pemerintah.

Dari hasil penelitian menunjukkan, dalam penyelenggaraan pembinaan hubungan kerja sama dengan organisasi/ lembaga/ tokoh kemasyarakatan dan Instansi pemerintah oleh fungsi Binamitra, sebagian besar (55,6%) menyatakan bahwa hanya sebagian tugas tersebut yang sudah didukung dengan kualitas dan kuantitas personel yang memadai.

Kondisi ini juga terjadi disemua Polda kecuali Polda Bali yang menyatakan sudah didukung dan sebagian didukung seimbang yaitu 39,4%.

Dengan kondisi tersebut, secara umum pelaksanaan tugas-tugas yang dilakukan oleh fungsi Binamitra masih belum

dapat dilakukan secara efektif. Untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas fungsi Binamitra ini maka anggota Binamitra melibatkan anggota Babinkamtibmas untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugasnya. Akan tetapi, oleh karena anggota Babinkamtibmas umumnya juga melaksanakan tugas-tugas lain di Polsek, maka fungsi pembinaan masyarakat yang dilakukan baik oleh Babinkamtibmas maupun Binamitra juga masih belum efektif

### c. Fungsi Samapta

- 1) Kualitas dan kuantitas personel fungsi Samapta dalam pelaksanaan tugas pengaturan. (Lihat Tabel 5 disebelah halaman ini)

Dari tabel di sebelah (Tabel 15) dapat diketahui bahwa sebagian besar responden (56,9%) yang menyatakan pelaksanaan tugas pengaturan sebagian didukung oleh kualitas dan kuantitas personel yang ada. Kondisi ini juga terjadi disemua Polda kecuali Polda Maluku yang menyatakan sudah didukung sebesar 90,5%.

- 2) Kualitas dan kuantitas personel fungsi Samapta dalam pelaksanaan tugas penjagaan

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa sebagian besar responden (44,4%) menyatakan pelaksanaan tugas penjagaan oleh fungsi Samapta hanya sebagian yang sudah didukung dengan kualitas dan kuantitas personel. Kondisi ini juga terjadi disemua Polda kecuali Polda Maluku yang menyatakan sudah didukung (90,5%) sedangkan Polda Bali dan Polda Metrojaya yang menyatakan sudah didukung dan sebagian didukung seimbang yaitu 46,4%.

- 3) Kualitas dan kuantitas personel fungsi Samapta dalam pelaksanaan tugas pengawasan

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa responden yang menyatakan sudah didukung dan sebagian didukung hampir seimbang yaitu 39,8% dan 41,7%. Sedangkan di Polda lain seperti Polda Sultra, Polda Babel, Polda Maluku dan Polda Jabar sebagian didukung dengan kualitas dan kuantitas personel.

- 4) Kualitas dan kuantitas personel fungsi Samapta dalam pelaksanaan tugas patroli

Dari hasil penelitian menunjukkan, bahwa sebagian besar responden (47,7%) menyatakan pelaksanaan tugas patroli hanya sebagian didukung dengan kuantitas dan kualitas personel Samapta yang memadai.

Tabel 5

Polda Penelitian		Kualitas dan kuantitas personil dalam penyuluhan dan penerangan			Total
		Sudah terdukung	Sebagian terdukung	Belum terdukung	
Polda Sultra	Count	2	9	16	27
	% within Polda Penelitian	7.4%	33.3%	59.3%	100.0%
Polda Bangka Belitung	Count	5	16	6	27
	% within Polda Penelitian	18.5%	59.3%	22.2%	100.0%
Polda Maluku	Count	2	13	8	23
	% within Polda Penelitian	8.7%	56.5%	34.8%	100.0%
Polda Jabar	Count	7	33	10	50
	% within Polda Penelitian	14.0%	66.0%	20.0%	100.0%
Polda Bali	Count	10	17	6	33
	% within Polda Penelitian	30.3%	51.5%	18.2%	100.0%
Total	Count	26	88	46	160
	% within Polda Penelitian	16.3%	55.0%	28.8%	100.0%

Kondisi ini juga terjadi disemua Polda.

- 5) Kualitas dan kuantitas personil fungsi Samapta dalam pelaksanaan tugas Pamsus VIP  
Hasil penelitian menunjukkan, bahwa responden yang menyatakan bahwa dalam tugas Pamsus VIP hampir seimbang antara sebagian terdukung dan belum terdukung yaitu 38,9% dan 36,1%. Kondisi ini juga terjadi disemua Polda.
- 6) Kualitas dan kuantitas personil fungsi Samapta dalam pelaksanaan tugas Pamsus Obvit  
Hasil penelitian menunjukkan, bahwa sebagian besar responden (49,1%) menyatakan pelaksanaan tugas Pamsus Obvit sebagian didukung dengan kualitas dan kuantitas personel, Kondisi ini juga terjadi disemua Polda.
- 7) Kualitas dan kuantitas personil fungsi

Samapta dalam pelaksanaan tugas Pengamanan Obyek Wisata

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas Pengamanan Obyek Wisata, responden yang menyatakan sebagian terdukung dan belum terdukung dengan kualitas dan kuantitas personel seimbang antara 37,5% dan 36,6%. Kondisi ini juga terjadi disemua Polda kecuali Polda Bali dan Polda Metro yang menyatakan seimbang antara sudah terdukung dan sebagian terdukung.

- 8) Kualitas dan kuantitas personil fungsi Samapta dalam pelaksanaan tugas bantuan Satwa  
Begitu pula dengan pelaksanaan tugas bantuan satwa, sebagian besar responden (54,2%) juga menyatakan belum terdukung dengan kualitas dan kuantitas personel yang memadai. Kondisi ini juga terjadi disemua

Polda kecuali Polda Maluku yang menyatakan sebagian terdukung sebesar 47,6%.

- 9) Kualitas dan kuantitas personil fungsi Samapta dalam pelaksanaan tugas pengamanan unjuk rasa oleh Satuan Dalmas. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pengamanan unjuk rasa oleh Satuan Dalmas, sebagian besar responden (47,7%) menyatakan bahwa sebagian terdukung kualitas dan kuantitas personel yang

dan dilatih secara priodik.

d. Fungsi Reskrim

- 1) Kualitas dan kuantitas personil fungsi Reskrim dalam pelaksanaan tugas penyelidikan tindak pidana umum.

Tabel 6  
Sebagian besar responden (53,0%)

Polda Penelitian		Kualitas dan kuantitas personil dalam tugas penyelidikan tindak pidana umum, korupsi dan tertentu			Total
		Sudah terdukung	Sebagian terdukung	Belum terdukung	
Polda Sultra	Count	4	14	10	28
	% within Polda Penelitian	14.3%	50.0%	35.7%	100.0%
Polda Bangka Belitung	Count	4	12	12	28
	% within Polda Penelitian	14.3%	42.9%	42.9%	100.0%
Polda Maluku	Count	21	3	0	24
	% within Polda Penelitian	87.5%	12.5%	.0%	100.0%
Polda Jabar	Count	3	40	14	57
	% within Polda Penelitian	5.3%	70.2%	24.6%	100.0%
Polda Bali	Count	2	22	13	37
	% within Polda Penelitian	5.4%	59.5%	35.1%	100.0%
Polda Metrojaya	Count	0	6	3	9
	% within Polda Penelitian	.0%	66.7%	33.3%	100.0%
Total	Count	34	97	52	183
	% within Polda Penelitian	18.6%	53.0%	28.4%	100.0%

memadai. Kondisi ini juga terjadi disemua Polda kecuali Polda Metrojaya yang menyatakan sudah terdukung sebesar 51,2%.

Berdasarkan kondisi tersebut, secara umum dapat dikatakan bahwa pelaksanaan tugas-tugas yang dilakukan oleh fungsi Samapta masih belum dapat dilakukan secara efektif. Untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas fungsi Samapta ini maka di beberapa Polres dibentuk Dalmas kerangka, yang anggotanya diambilkan dari fungsi-fungsi lain

menyatakan bahwa pelaksanaan tugas penyelidikan tindak pidana umum sebagian terdukung, kondisi ini juga terjadi disemua Polda kecuali Polda Maluku yang menyatakan sudah terdukung sebesar ( 87,5%)

- 2) Kualitas dan kuantitas personil fungsi Reskrim dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana umum.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana umum, sebagian besar responden (49,2%)

menyatakan bahwa sebagian terdukung dengan kualitas dan kuantitas personel yang memadai dalam tugas penyidikan tindak pidana umum, korupsi, kondisi ini juga terjadi disemua Polda kecuali Polda Maluku yang menyatakan sudah terdukung sebesar 95,8%.

- 3) Kualitas dan kuantitas personil fungsi Reskrim dalam pelaksanaan tugas laboratorium forensik lapangan.

Begitu pula dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas laboratorium forensik lapangan, jumlah responden yang menyatakan (40,4%) responden menyatakan bahwa pelaksanaan tugas tersebut sebagian terdukung, Kondisi ini juga terjadi disemua Polda kecuali Polda Metrojaya yang menyatakan sudah terdukung sebesar (55,6%) yang menyatakan kualitas dan kuantitas tugas laboratorium forensik lapangan.

- 4) Kualitas dan kuantitas personil fungsi Reskrim dalam pelaksanaan tugas pelayanan/ perlindungan khusus kepada korban/ pelaku remaja, anak dan wanita dalam penegakkan hukum.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pelayanan/ perlindungan khusus kepada korban/ pelaku remaja, anak dan wanita dalam penegakkan hukum oleh fungsi Reskrim, sebagian besar responden (47,5%) menyatakan sebagian terdukung dengan kualitas dan kuantitas personel yang ada. Kondisi ini juga terjadi disemua Polda kecuali Polda Bangka Belitung dan Polda Maluku yang menyatakan sebagian besar belum terdukung.

- 5) Kualitas dan kuantitas personil fungsi Reskrim dalam pelaksanaan tugas identifikasi.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas identifikasi, sebagian besar responden menyatakan sebagian terdukung (51,4%) dengan kualitas dan kuantitas yang memadai, Kondisi ini juga terjadi disemua Polda kecuali Polda Bali yang menyatakan sudah terdukung sebesar 54,1%, dan Polda Maluku menyatakan sebagian besar belum terdukung 50,0% dalam kaitannya dalam tugas identifikasi personel.

- 6) Kualitas dan kuantitas personil fungsi Reskrim dalam pelaksanaan penyelenggaraan pembinaan teknis dan koordinasi serta pengawasan operasional maupun administrasi penyidikan PPNS.

Berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pembinaan teknis dan koordinasi serta pengawasan operasional maupun administrasi penyidikan PPNS,

sebagian besar responden (47,5%) menyatakan bahwa pelaksanaan tugas tersebut sebagian terdukung dengan kualitas dan kuantitas personel.

- 7) Kualitas dan kuantitas personil fungsi Reskrim dalam pelaksanaan tugas analisa kasus dan isue-isue menonjol.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas analisa kasus dan isue-isue menonjol, jumlah responden yang menyatakan bahwa pelaksanaan tugas tersebut sudah terdukung dengan kualitas dan kuantitas personel fungsi Reskrim cukup besar, yaitu 19,7%. Meskipun demikian, sebagian besar responden (48,1%) menyatakan bahwa pelaksanaan tugas tersebut hanya sebagian yang terdukung dengan personel yang memadai.

- 8) Kualitas dan kuantitas personil fungsi Reskrim dalam pelaksanaan penanganan dan mempelajari/ mengkaji efektifitas pelaksanaan tugas.

Kualitas dan kuantitas personel fungsi Reskrim dalam pelaksanaan tugas penanganan dan mempelajari/ mengkaji efektifitas pelaksanaan tugas dari informasi, menurut sebagian besar responden (54,1%) sebagian terdukung oleh kualitas dan kuantitas personel yang memadai, sedangkan jumlah yang menyatakan sudah terdukung cukup besar hanya 16,4%.

Berdasarkan kondisi tersebut, secara umum dapat dikatakan bahwa dikaitkan dengan kualitas dan kuantitas personel yang ada, fungsi Reskrim belum dapat melaksanakan tugasnya secara efektif.

#### e. Fungsi Lantas

- 1) Kualitas dan kuantitas personil fungsi Lantas dalam pelaksanaan tugas Turjawali. (Lihat Tebel 7 pada halaman sebelah)

Dalam pelaksanaan tugas Turjawali, sebagian besar responden (58,7%) menyatakan bahwa pelaksanaan tugas tersebut sebagian yang sudah terdukung dengan kualitas dan kuantitas personel yang memadai. 10% menyatakan belum terdukung, dan hanya 30,8% menyatakan sudah terdukung. Kondisi ini juga terjadi disemua Polda.

- 2) Kualitas dan kuantitas personil fungsi Lantas dalam rangka penanganan pelanggaran kecelakaan lalu lintas.

Berkaitan dengan penanganan pelanggaran kecelakaan lalu lintas, sebagian besar responden (47,1%) menyatakan bahwa

Tabel 7

Polda Penelitian		Kualitas dan kuantitas personil dalam tugas Turjawali			Total
		Sudah terdukung	Sebagian terdukung	Belum terdukung	
Polda Sultra	Count	4	21	5	30
	% within Polda Penelitian	13.3%	70.0%	16.7%	100.0%
Polda Bangka Belitung	Count	6	18	6	30
	% within Polda Penelitian	20.0%	60.0%	20.0%	100.0%
Polda Maluku	Count	20	0	0	20
	% within Polda Penelitian	100.0%	.0%	.0%	100.0%
Polda Jabar	Count	10	32	4	46
	% within Polda Penelitian	21.7%	69.6%	8.7%	100.0%
Polda Bali	Count	13	20	1	34
	% within Polda Penelitian	38.2%	58.8%	2.9%	100.0%
Polda Metrojaya	Count	0	10	2	12
	% within Polda Penelitian	.0%	83.3%	16.7%	100.0%
Total	Count	53	101	18	172
	% within Polda Penelitian	30.8%	58.7%	10.5%	100.0%

pelaksanaan tugas tersebut hanya sebagian yang sudah terdukung dengan kualitas dan kuantitas personil fungsi Lantas. Kondisi ini juga terjadi disemua Polda kecuali Polda Maluku yang menyatakan sudah terdukung sebesar 85,0% dan Polda Bali seimbang antara sudah terdukung dan sebagian terdukung.

- 3) Kualitas dan kuantitas personil fungsi Lantas dalam penyelenggaraan operasi kepolisian dalam rangka penegakkan hukum dan ketertiban masyarakat.

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan operasi kepolisian dalam rangka penegakkan hukum dan ketertiban masyarakat, sebagian besar responden (51,2%) bahwa pelaksanaan tugas tersebut sebagian terdukung dengan. Kualitas dan kuantitas personel yang ada.

Kondisi ini juga terjadi disemua Polda kecuali Polda Maluku yang menyatakan sudah terdukung sebesar 55,0% dan Polda Metrojaya seimbang antara sudah, sebagian dan belum terdukung.

- 4) Kualitas dan kuantitas personil fungsi Lantas dalam pelaksanaan tugas pendidikan masyarakat di bidang lalu lintas

Sebaliknya dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pendidikan masyarakat di bidang lalu lintas, 50,6% responden justru menyatakan sebagian terdukung dengan kualitas dan kuantitas personel yang ada. Kondisi ini juga terjadi disemua Polda kecuali Polda Bangka Belitung yang menyatakan belum terdukung sebesar 40%.

- 5) Kualitas dan kuantitas personil fungsi Lantas

dalam pelaksanaan tugas dibidang pengkajian masalah lintas

Berkaitan dengan pelaksanaan tugas dibidang pengkajian masalah lintas, sebagian besar responden (49,4%) menyatakan bahwa hanya sebagian yang sudah terdukung dengan kualitas dan kuantitas personel yang ada. Kondisi ini juga terjadi disemua Polda kecuali Polda Bali yang menyatakan sudah terdukung sebesar 47,1% dan Polda Bangka Belitung yang menyatakan belum terdukung (56,7%).

- 6) Kualitas dan kuantitas personil fungsi Lintas dalam penyelenggaraan perekayasaan lintas dan kerjasama lintas sektoral.

Berkaitan dengan penyelenggaraan perekayasaan lintas dan kerjasama lintas sektoral, jumlah responden yang menyatakan Sebagian besar responden (49,4%) menyatakan sebagian terdukung dengan kualitas dan kuantitas personel yang memadai. Kondisi ini juga terjadi disemua Polda kecuali Polda Bali dan Polda Maluku yang menyatakan sudah terdukung, serta Polda Metrojaya yang menyatakan seimbang antara sebagian terdukung dan belum terdukung.

- 7) Kualitas dan kuantitas personil fungsi Lintas dalam penyelenggaraan administrasi registrasi dan identifikasi Ranmor dan pengemudi.

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan administrasi registrasi dan identifikasi Ranmor dan pengemudi, jumlah responden yang menyatakan sudah terdukung dan sebagian terdukung dengan kualitas dan kuantitas personel hampir sebanding yaitu 37,8% dan 36,0%.

Berdasarkan kondisi tersebut, secara umum pelaksanaan tugas-tugas yang dilakukan oleh fungsi Lintas dapat dikatakan bahwa belum dapat dilakukan secara efektif.

Untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas fungsi Lintas, maka sebagian anggota Samsat diterjunkan di jalan-jalan untuk membantu tugas pengaturan lalu lintas, terutama pada pagi hari / jam-jam sibuk khususnya diparkotaan. Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat diluar jam sibuk maka penugasan pada Pos Tetap hingga pukul 22.00 atau bahkan 24 jam.

4. Dampak penggelaran anggota Polri di Lapangan untuk pelaksanaan tugas Opsnal.

Menurut masyarakat, kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya di area publik secara umum sangat kondusif dan terkendali.

Sebagian besar masyarakat juga menyampaikan bahwa selama ini mereka merasa aman tinggal di daerah itu, namun demikian mereka menghendaki agar keberadaan polisi di daerah itu ditambah, dan dapat melaksanakan patroli minimal sehari sekali, serta pos-pos polisi yang sudah ada agar selalu diisi / jangan ditinggalkan kosong.

Dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari masyarakat merasa aman, dalam bekerja hal ini disebabkan karena pengamanan yang diberikan Polri cukup memadai dan pendekatan yang dilakukan anggota Polri ke masyarakat dengan sambang dan patroli ke desa-desa. Demikian juga dalam aktivitas di malam hari, secara umum kondisi keamanan dan ketertiban cukup kondusif. Hanya saja masyarakat masih mengeluhkan kondisi kantibcar lalulintas pada jam-jam tertentu yang masih macet, dilain pihak Polisi jarang terlihat.

Wujud partisipasi masyarakat terhadap Polri sebagai kontribusi dalam memelihara Kamtibmas antara lain dilakukan dengan memberikan informasi kepada anggota Polri tentang situasi kamtibmas di lingkungannya. Bersama-sama memelihara keamanan dalam lingkungannya dengan membentuk FKPM sebagai mitra Polri dalam masyarakat, serta aktif mengikuti kegiatan yang sifatnya membantu kelancaran tugas Polri.

Harapan masyarakat kepada Polri di wilayah dan jajaran, agar pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan, dan supaya berlaku adil serta transparan dalam menangani setiap permasalahan, tidak pandang bulu. Dalam menangani perkara, demonstrasi jangan arogan dengan tetap memegang prinsip praduga tak bersalah sehingga tidak menodai citra Polri sendiri.

5. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penggelaran keberadaan anggota Polri di lapangan untuk pelaksanaan tugas Opsnal.

Bidang manajemen/organisasi, sebagai konsekuensi dan diberlakukannya otonomi daerah banyak wilayah yang dimekarkan baik daerah Kabupaten, maupun Kecamatan sehingga organisasi Polri harus mengimbangnya dengan personel dan perlengkapannya untuk dapat mendekati pelayanan kepada masyarakat. Kurangnya personel, khususnya pada fungsi Opsnal akan berpengaruh dalam penanganan gangguan Kamtibmas.

Bidang pembinaan, masih belum tercukupinya personil fungsi tertentu sehingga pelaksanaan tugas masih dirangkap untuk kelancaran pelaksanaan tugas demi kepentingan organisasi. Personel yang memiliki pendidikan kejuruan juga masih kurang sehingga kemampuan

dan pengetahuan anggota tentang fungsi kepolisian masih terbatas. Peralatan yang ada juga masih kurang dan sebagian lagi sudah ada yang rusak, seperti peralatan Komlek dan lainnya. Demikian juga untuk peralatan yang ada di tiap fungsi sangat terbatas dan tidak memadai sehingga menimbulkan hambatan dalam pelaksanaannya.

**6. Kondisi aspek kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan dalam pelaksanaan gelar keberadaan anggota Polri di lapangan.**

**a. Kekuatan (*strengths*)**

- 1) Polri telah mengambil langkah reformasi menuju lembaga Kepolisian Sipil, profesional dan mandiri, dengan pembenahan berkelanjutan pada reformasi struktural, reformasi instrumental dan reformasi kultural.
- 2) Adanya visi dan misi Polri yang sesuai dengan paradigma baru Polri.
- 3) Dipenuhinya anggaran yang memadai dengan pengelolaannya diserahkan langsung kepada Polri.
- 4) Komitmen meningkatkan kuantitas para anggota Polisi, pada rasio pada jumlah Polisi terhadap pertumbuhan penduduk.
- 5) Adanya komitmen dari pemerintah untuk memberikan/ memenuhi sarana dan prasarana Polri
- 6) Kemauan dan kesadaran anggota Polri dalam menyikapi perubahan dalam masyarakat.

**b. Kelemahan (*weaknesses*)**

- 1) Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri masih rendah.
- 2) Masih rendahnya kemampuan dan ketrampilan personel Polri di lapangan dalam menghadapi kualitas dan kuantitas kejahatan.
- 3) Masih adanya oknum Polri yang masih menganut paradigma lama (arogan, sewenang-wenang)
- 4) Masih adanya tindakan sebagian anggota Polri yang belum transparan dalam pelayanan masyarakat dan merasa terusik oleh kontrol Masyarakat.
- 5) Masih belum tercukupi rasio petugas operasional Polri dengan jumlah penduduk yang dilayani, mengingat masih ada wilayah yang rasio Polri dibandingkan masyarakat belum memadai.
- 6) Masih belum terdukungnya peralatan khusus untuk beberapa penugasan khusus oleh satuan-satuan operasional.

**c. Peluang (*opportunities*)**

- 1) Adanya anggaran Polri dari pemerintah yang cukup besar.
- 2) Kinerja Polri yang relative lebih baik akhir-akhir ini terutama dalam penanganan terorisme, demonstrasi, kejahatan Narkoba, pelaksanaan disiplin kode etik Polri, dan kesadaran untuk terus berbenah diri terhadap masih banyak perilaku yang tak terpuji dari kalangan sementara anggota Polisi.
- 3) Kepercayaan terhadap masyarakat baik regional maupun internasional terhadap kinerja Polri
- 4) Peningkatan tuntutan standard service pada berbagai public service providers di masyarakat perkotaan, mendorong Polri memfokuskan pada upaya meningkatkan service dalam penanggulangan kejahatan dan ketidaktertiban.
- 5) Adanya bantuan baik instansi pemerintah dalam negeri maupun luar negeri seperti Diklat, bantuan teknis dan peralatan, bantuan/ pinjaman/ kredit ekspor dan tukar menukar informasi.
- 6) Tekad pemerintah untuk perkokoh sendi-sendi kehidupan demokrasi yang dilandasi rasa aman, adil dan sejahtera, merupakan pegangan bagi Polri untuk mereformasi diri secara berkelanjutan, serta meningkatkan efektivitas fungsi-fungsi Kepolisian yang dipercayakan kepada Polri.

**d. Ancaman (*threats*)**

- 1) Kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari kepulauan dan perairan yang luas, dengan penyebaran penduduk yang tidak merata dan sumber alam yang melimpah, telah menciptakan kerawanan keamanan yang multidimensi, terutama di perairan, pertambangan dan kehutanan apabila tidak di barengi penertiban internal instansi terkait dapat menciptakan pemerintahan yang tidak bersih.
- 2) Sumber daya manusia yang tersedia di masyarakat Indonesia, yang merupakan calon-calon personel Polri, masih memiliki paradigma bahwa Polisi adalah penguasa yang bias menuntut dan meminta sesuatu pada masyarakat, bukan sebagai pelayan masyarakat yang dituntut banyak member.

- 3) Masih adanya sikap skeptis dari kelompok masyarakat terhadap kinerja Polri karena adanya perubahan paradigma maupun validasi organisasi.
- 4) Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri akibat penayangan tindakan negatif yang dilakukan oleh oknum anggota Polri.
- 5) Adanya kecenderungan untuk mendiskreditkan Polri sebagai institusi, sebagai akibat dari adanya tindakan tidak terpuji dari anggota Polri.
- 6) Gangguan keamanan dapat terjadi di setiap tempat, waktu, dan kondisi, baik di kota besar maupun di pedesaan.

#### 7. Upaya yang dilakukan untuk pelaksanaan penggelaran keberadaan anggota Polri di Lapangan.

Untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di beberapa wilayah Kecamatan baru telah diusulkan untuk dibentuk Polsek persiapan, dan pos-pos polisi dengan penambahan personel dan peralatan. Meskipun demikian, tetap jumlah yang pos-pos yang diusulkan masih kurang jika dibandingkan dengan wilayah yang ada. Karena itu pengusulan pembentukan pos-pos baru diutamakan untuk wilayah yang rawan.

Kreativitas yang dilakukan oleh setiap Polres dalam mengatasi kendala yang ada di wilayahnya akibat keterbatasan personel dibandingkan luas wilayah cukup membantu, dalam menghadapi tantangan tugas baik rutin, insidental maupun yang lebih khusus yang memerlukan perkuatan / pengerahan personel yang lebih banyak. Disamping itu pemberdayaan potensi budaya juga cukup efektif untuk menekan gangguan Kamtibmas khususnya perkelahian antar kampung.

Untuk pelaksanaan tugas-tugas Opsnal guna terciptanya situasi kamtibmas, maka dibentuk forum-forum kemitraan dengan masyarakat serta memberdayakan potensi budaya setempat. Meskipun demikian, pembentukan forum-forum kemitraan itu belum optimal karena berdasarkan pada target, dan belum berorientasi pada kegiatan lanjutan dari forum yang sudah dibentuk.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### 1. Kesimpulan

- a. Pencapaian ratio Polisi dengan masyarakat Perbandingan ratio Polri dengan masyarakat di satuan kewilayahan masih sangat beragam, namun umumnya sudah

memenuhi / ideal bila mengacu pada standar ratio polisi dengan masyarakat yang ditentukan PBB yaitu 1 : 500.

Ratio Polri dengan masyarakat secara umum di Polda yang menjadi sampel penelitian sudah memenuhi standar, yaitu :

- |                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| 1) Polda Bali      | ratio 1 : 298   |
| 2) Polda Sultra    | ratio 1 : 344   |
| 3) Polda Metrojaya | ratio 1 : 307   |
| 4) Polda Babel     | ratio 1 : 369   |
| 5) Polda Maluku    | ratio 1 : 211   |
| 6) Polda Jabar     | ratio 1 : 1.380 |

Namun jumlah ratio tersebut masih secara umum/global, belum dibedakan antara polisi yang bertugas di fungsi pembinaan/ staf maupun polisi yang bertugas di fungsi operasional. Apabila dilihat dari tiap-tiap fungsi khususnya fungsi Opsnal yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, perbandingan jumlah Polri dan masyarakat masih dirasakan belum mencukupi.

#### b. Pengalokasian personel yang ada di setiap Polres yang diteliti.

Mengacu pada Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/07/1/2005 tanggal 31 Januari 2005 tentang perubahan Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/54/X/2002 tanggal 17 oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja satuan-satuan Organisasi Polri tingkat Kewilayahan dan perubahannya. Pengalokasian personel di tingkat Satuan Kewilayahan khususnya untuk tugas fungsi Opsnal umumnya masih belum terpenuhi. Jabatan-jabatan setingkat Kanit di Polsek masih banyak yang dijabat oleh Bintara/ Bintara tinggi, bahkan masih ada jabatan Pamen di tingkat Polda masih ada yang belum terisi, seperti di Polda Bali dan Metrojaya Wadir Narkoba belum ada, demikian juga Wadir Polair Bali masih kosong.

#### c. Penggelaran keberadaan anggota Polri di Lapangan untuk tugas Opsnal.

Penggelaran keberadaan anggota Polri secara rutin dilakukan sesuai kegiatan dari masing-masing fungsi Opsnal. Dalam menghadapi eskalasi kerawanan yang meningkat maka penggelaran personel oleh fungsi-fungsi Opsnal, lebih ditingkatkan dengan memperhatikan aktivitas masyarakat dengan memaksimalkan kehadiran polisi di lapangan, misalnya terhadap adanya unjuk rasa, pengamanan keramaian, pengamanan Pilkada/Pilpres, pengamanan terhadap event-event berskala nasional dan internasional, maka pola rayonisasi antar Satwil terdekat



akan lebih efektif, Bahkan kadang-kadang masih dirasakan perlu perkuatan personel dari Mabes Polri (back up).

Dengan jumlah ratio yang ada ternyata berpengaruh terhadap penggelaran keberadaan anggota Polri di lapangan, pengaruh itu selain disebabkan jumlah anggota Polri yang kurang diakibatkan kondisi wilayah seperti wilayah kepulauan, luasnya wilayah dan lain-lain.

Jumlah anggota di setiap Polres belum memadai, jika dilihat dari setiap fungsi opsional yang ada. Jumlah anggota di tingkat Polsek maupun Pos Polisi yang dirasakan perlu penambahan (kurang dari Daftar Susunan Personel).

d. **Dampak penggelaran anggota Polri di lapangan untuk pelaksanaan tugas Opsional.**

Masyarakat masih sering menanyakan eksistensi pelaksanaan tugas Polri. Masyarakat juga jarang melihat keberadaan anggota Polri khususnya Babinkamtibmas di lokasi/desanya. Masyarakat juga masih mengeluhkan kondisi kemacetan lalu lintas pada waktu jam-jam tertentu. Namun masyarakat menyatakan secara umum kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat tidak terganggu.

e. **Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penggelaran keberadaan anggota Polri di Lapangan.**

Masih kurangnya personel, khususnya pada fungsi Opsional, kemampuan personel yang belum memadai karena belum didukung dengan pendidikan kejuruan. Faktor geografis, yang menyangkut lokasi dan kondisi wilayah Bali yang merupakan daerah pegunungan dan perairan yang sangat luas, wilayah kepulauan yang sulit dijangkau dengan sarana transportasi yang ada. Hal ini berpengaruh terhadap aktivitas anggota dalam melakukan tugasnya. Disamping itu sarana /peralatan dan prasarana masih belum memadai, seperti perumahan dan lain-lain.

f. **Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan penggelaran keberadaan anggota.**

Kreativitas yang dilakukan oleh setiap Polres dengan membentuk rayonisasi antar wilayah dalam mengatasi keterbatasan personel cukup membantu, dalam

menghadapi tantangan tugas baik rutin, insidental maupun yang lebih khusus yang memerlukan perkuatan / penerahan personel yang lebih banyak.

## 2. Saran

- a. Meskipun sebagian besar sampel Polda yang diteliti sudah mencapai ratio, akan tetapi bila dilihat pada penggelaran personel di lapangan/fungsi operasional dari tiap-tiap Polres dan Polsek masih sangat kekurangan. Untuk itu agar Keputusan Kapolri No Pol. Kep/ 53 dan 54/ X/2002, serta Keputusan Kapolri No Pol. Kep/07/ I /2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja satuan-satuan organisasi Polri tingkat Kewilayahan dan perubahannya, dapat direvisi memenuhi kebutuhan operasional lapangan.
- b. Untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan tugas Opsional, maka beberapa jabatan disetiap fungsi Opsional yang masih kosong, agar dapat diisi oleh personel yang berkompeten.
- c. Diperlukan peningkatan kuantitas dan kualitas personel di tingkat Polsek/Pospol untuk lebih mengefektifkan peran Polmas di tingkat Polsek yang selama ini dirasakan masih terkendala.
- d. Diharapkan Polri dapat lebih konsisten dalam melaksanakan tugas-tugas patroli/ sambang desa untuk menciptakan rasa aman ditengah masyarakat.
- e. Dilihat dari kondisi geografis, maka setiap fungsi Opsional yang mengalami kekurangan personel perlu untuk segera dicukupi. Untuk kekuatan Brimob di wilayah perbatasan yang masih berstatus Peleton aju, perlu dipertimbangkan untuk ditingkatkan menjadi Kompi standar.
- f. Metode rayonisasi dalam menyiasati keterbatasan personel yang telah berjalan efektif antar wilayah, perlu dimantapkan melalui pelatihan fungsi secara periodik.

Tim Peneliti :

Kabag Prolit Rolitbang Sderembang Polri dan Tim